



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Optimalisasi Peran Gerakan PKK dalam Mencegah Pelecehan Seksual terhadap Anak Melalui Program Gotong Royong dan Pendidikan

Ardhiwinda Kusumaputra^{1*}, Endang Retnowati¹, Agam Sulaksono¹
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya^{1,2,3}

*email korespondensi penulis: ardhiwinda_fh@uwks.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pada dasarnya mempunyai peran krusial terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam lingkup misalnya pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi. Namun, keberadaan PKK yang sampai pada tingkat lokal (kelurahan), ternyata masih belum sepenuhnya optimal. Apalagi jika dihadapkan dengan isu sosial dan hukum, salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap anak. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan atas permasalahan tersebut adalah di Kelurahan Kalianyar. Adapun yang menjadi sorotan pokok permasalahannya adalah apakah yang menjadi kendala bagi PKK dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak? Bagaimana optimalisasi peran PKK dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak? **Tujuan:** Tujuannya adalah memberikan alternatif solusi atas pokok permasalahan sekaligus meningkatkan kompetensi PKK dengan tetap berdasar pada aspek hukum. **Metode:** Dilakukan kegiatan sosialisasi yang dimaksudkan untuk dapat menemukan jawaban dari pokok persoalan, sekaligus dapat memberikan alternative penyelesaian dan peningkatan wawasan masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil. **Hasil:** Adapun yang menjadi temuan bahwa terdapat kendala diantaranya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat peran dari PKK. Masyarakat masih beranggapan jika PKK adalah wadah perkumpulan saja, tanpa punya peran yang krusial. Masih belum meratanya PKK pada setiap warga, yang dibuktikan dengan masih ada warga yang tidak terlibat dalam kegiatan PKK. Atas dasar itulah, maka bentuk optimalisasinya dilakukan dengan menguatkan program gotong royong dan pendidikan. Dalam hal ini perlu ada peran dari Kepala Kelurahan Kalianyar untuk lebih aktif mengajak masyarakatnya. **Kesimpulan:** Perlunya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat (umum), khususnya anggota PKK untuk aktif dan peka terhadap tindakan / potensi aktifitas yang mengarah pada pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan terdekat yaitu keluarga dan tetangga.

Kata Kunci: Optimalisasi, Gerakan PKK, Pelecehan Seksual Anak, Program Gotong Royong dan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Anak pada dasarnya adalah penerus generasi. Membawa harapan untuk masa depan keluarga maupun bangsa. Bahkan secara konstitusional berdasar pada Pasal 28B UUD NRI 1945, telah menempatkan anak sebagai bagian khusus untuk memperoleh perlindungan dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, serta bebas dari diskriminasi. Namun, tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

kekerasan, khususnya secara seksual (pelecehan seksual) terhadap anak. Ada beberapa bentuk pelecehan seksual, mulai dari bentuk langsung secara fisik, verbal bahkan juga secara virtual (online).

Masyarakat di lingkungan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan masih mempunyai potensi terjadinya kasus pelecehan seksual. Hal itu juga dipicu beragam kasus pelecehan seksual pada skala nasional mencapai sekitar 9.588 di tahun 2022 (Jovani, 2016), yang beritanya juga banyak diterima oleh masyarakat. Bahkan di wilayah Bangil juga terjadi kasus yang sama meskipun jumlahnya masih belasan. Kasus pelecehan seksual ini ibarat fenomena gunung es. Di permukaan hanya terlihat sebagean kecil (jumlah) kasusnya. Jauh berbeda ketika kasus yang tidak terlihat. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang tidak berani melapor dan juga kasus pelecehan seksual yang kian beragam (tidak kentara), serta masyarakat yang juga belum begitu memahami beragam bentuknya di era saat ini.

Apalagi di sisi lain, terdapat lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang pada hakikatnya mampu untuk menjadi lembaga yang berperan dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Hal itu mengingatkan pula jika lembaga PKK, khususnya yang selama ini berada di wilayah Kelurahan Kalianyar belum berjalan secara optimal. Padahal secara mendasar terdapat program gotong royong dan pendidikan. Atas dasar itulah kemudian, penting untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pencegahan pelecehan seksual terhadap anak melalui optimalisasi peran lembaga PKK.

METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada dasarnya metode penelitian berdasar pada penelitian hukum empiris. Adapun dalam pelaksanaannya adalah dengan cara melakukan pengumpulan dan telaah data melalui wawancara langsung dan sosialisasi / pengabdian kepada masyarakat. Secara khusus diikuti oleh masyarakat di Wilayah Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya eksistensi lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bukan sekedar menjadi suatu perkumpulan rutin. Peningkatan taraf hidup itu dilakukan melalui serangkaian program-program PKK. Namun, tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat masalah dalam hal belum optimalnya PKK sebagai suatu lembaga yang mampu menjawab ataupun mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. PKK bukanlah lembaga rutin yang hanya sebatas melakukan perkumpulan, tetapi aktivitas yang lebih memberikan peningkatan pemahaman masyarakat untuk



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

mencegah pelecehan seksual terhadap anak, yang saat ini semakin mengalami situasi yang butuh perhatian sangat serius.

Secara normatif keberadaan Lembaga / Gerakan PKK adalah menjadi penggerak pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu juga sejalan dengan apa yang sudah termaktub dalam konsideran menimbang dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (selanjutnya disebut Perpres No. 99 Tahun 2017). Gerakan PKK juga dapat dipahami sebagai suatu organisasi atau lembaga yang berada pada tingkat lokal (berskala lokal), dan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga (Rantung et al., 2014). Keberadaan Gerakan (lembaga) PKK bukan hanya sebagai suatu simbol, tetapi justru mengarah pada pembangunan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya yang didukung dan dinaungi oleh Pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pada tingkat lokal (skala desa/kelurahan) (Jovani, 2016).

Berdasar Perpres No. 99 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (selanjutnya disebut Permendagri No. 36 Tahun 2020), telah memberikan 10 program pokok Gerakan PKK, diantaranya:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Berupa pembentukan dan penumbuhan karakter Keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Gotong royong, peningkatan kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar-Keluarga, warga, dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pangan yaitu, peningkatan ketahanan pangan Keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal.
- d. Sandang, peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai moral budaya bangsa Indonesia.
- e. perumahan dan tata laksana rumah tangga, peningkatan kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah.
- f. pendidikan dan keterampilan, peningkatan kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- g. Kesehatan, berupa penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

- h. pengembangan kehidupan berkoperasi, penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan taraf hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
- i. Kelestarian lingkungan hidup, yaitu penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat dan
- j. Perencanaan sehat, penumbuhan dan peningkatan kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju Keluarga berkualitas.

Atas dasar itulah, eksistensi Gerakan PKK perlu untuk lebih dioptimalkan dengan setidaknya mendasarkan pada pengembangan dua program utama, yaitu gotong royong dan pendidikan. Pada prinsipnya, gotong royong dalam arti untuk peningkatan kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar-Keluarga, warga, dan kelompok masyarakat, dibangun dengan adanya kepedulian sesama untuk mencegah tindak pelecehan seksual terhadap anak di wilayahnya. Hal ini juga sejalan dengan semangat kekeluargaan sebagaimana yang disampaikan oleh Moh. Hatta (Pane, 2015), dan sekaligus menjadi karakter fundamental bangsa Indonesia. Begitu juga dalam kaitannya dengan program pendidikan, yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan tindakan yang berpotensi mengarah pada kecenderungan tindak pelecehan seksual terhadap anak (Haryana et al., 2017).

Berdasar pada aspek tersebut, maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kalianyar dalam optimalisasi peran PKK untuk mencegah kekerasan seksual, khususnya terhadap anak. Hal itu di fokuskan pada dua program mendasar yaitu gotong royong dan pendidikan. Mengingat pula jika PKK adalah bagian dari kelembagaan hingga tingkat lokal (Wijayanto et al., 2022).



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Optimalisasi Gerakan PKK



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

Pada kegiatan ini juga muncul pertanyaan dari peserta, diantaranya apakah PKK ini boleh diikuti oleh perempuan yang masih muda atau belum menikah? Sebenarnya kegiatan PKK apa saja yang dapat dikembangkan? Karena selama ini memang kegiatan PKK ya itu-itu saja, diantaranya arisan. Terus terang, selama ini memang tidak semua anggota / pengurus PKK itu mempunyai kemampuan untuk mengerti tentang hal-hal seperti ini, masih terbatas pengetahuannya, nah itu seperti apa ya?

Berdasar pada pertanyaan peserta tersebut, diberikanlah beberapa jawaban bahwa secara normatif memang tidak disebutkan dari segi gender orang yang dapat menjadi pengurus maupun anggota PKK. Artinya, baik laki-laki dan perempuan, yang masuk kategori usia cakap hukum dapat menjadi pengurus / anggota PKK. Memang, tidak dapat dipungkiri jika selama ini PKK identik dengan kaum ibu-ibu. Sekalipun belum menikah, juga masih dapat berperan aktif dalam PKK. Hal itu didasarkan pada nilai filosofis jika PKK adalah bentuk gerakan untuk memberdayakan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Tentunya dalam hal pengembangan kegiatan PKK sebenarnya banyak yang dapat dilakukan, khususnya di era digital seperti saat ini. Hanya saja, pola pikir feodal terkadang justru menjadi tembok penghalau bagi pemikir pemikir muda untuk dapat menyalurkan dan mengaktualisasikan gagasannya. Apalagi pengembangan kegiatan untuk dapat melakukan pencegahan kekerasan seksual sangat mungkin untuk dilakukan. Gerakan PKK tidak hanya aktif di lingkungan warga, tetapi juga dapat masuk ke dalam lingkungan sekolah-sekolah. Tetapi kuncinya adalah untuk memberikan kesempatan pada ide-ide atau gagasan baru dari penerusnya (Elanda et al., 2023).

Pada kesempatan ini, hadir pula Kepala Kelurahan Kalianyar, Ibu Lutfianti yang sekaligus juga menjadi bagian kepengurusan PKK di Kelurahan Kalianyar. Beliau menyampaikan jika PKK yang ada ditingkat Kelurahan, RW maupun RT, memang harus lebih dioptimalkan. PKK mempunyai potensi dan peran krusial sebagaimana namanya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Makna sejahtera bukan hanya secara ekonomi yang dilakukan melalui arisan atau aktivitas perdagangan (kegiatan usaha), tetapi juga perlu untuk didukung dengan aktivitas lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yaitu pentingnya untuk memaksimalkan program gotong royong dan pendidikan. Saya selaku wakil pemerintah daerah maupun juga masyarakat mengucapkan terima kasih atas kehadiran kegiatan ini. Namun memang kalau dimungkinkan kegiatannya bisa berlanjut.

Berdasar pada pernyataan dari Ibu Kepala Kelurahan tersebut, memang harus diakui jika ketika masih terdapat persoalan secara kelembagaan PKK, misalnya aktivitas yang monoton, kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas, hingga pada pola pikir feodal, tentu akan menjadi penghambat PKK dalam



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

membantu mencegah kasus kekerasan seksual. Namun setidaknya, PKK harus mampu dioptimalkan sebagai suatu lembaga/gerakan yang sifatnya universal (Jannah et al., 2024). Artinya pada titik ini dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan ataupun stakeholder terkait lainnya. Melakukan modernisasi kegiatan PKK, misalnya dengan mengajak para remaja / pemuda-pemudi di wilayah Kelurahan Kalianyar untuk lebih mengenal PKK, ataupun juga dengan cara yang bernuansa digital terhadap aktivitas PKK (Pitriyanti, 2016).

Artinya, dengan mengajak berbagai stakeholder, merupakan bagian dari program gotong royong. Selanjutnya dapat diwujudkan suatu kegiatan edukasi berbasis digital, misalnya dengan memanfaatkan sosial media dalam memberikan informasi yang bermanfaat dalam hal pencegahan kekerasan seksual (Neherta, 2017). Membuat konten-konten yang menarik untuk dilihat, sehingga sosial media tidak sebatas menjadi hiburan, tetapi mampu dimanfaatkan sebagai sarana yang edukatif dan produktif. Inilah sejatinya PKK yang mampu bergerak secara lebih optimal, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Penyebab belum optimalnya peran PKK dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak adalah karena program yang dilakukan khususnya di wilayah Kelurahan Kalianyar masih bersifat klasikal. Belum adanya sumber daya manusia yang juga memahami terkait isu-isu tentang kekerasan seksual, sehingga khawatir akan terjadi kesalahan penyampaian informasi. Pada titik inilah sebagai langkah untuk mengoptimalkan peran PKK, perlu untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Melakukan semacam perluasan jangkauan PKK agar lebih universal. Menekankan pada program gotong royong dan pendidikan. Sehingga dapat lebih konsisten sebagaimana regulasi yang sudah ditetapkan, dan mampu berperan optimal dalam pencegahan kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dana guna terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Sekaligus diucapkan terima kasih kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil yang telah bersedia menerima kami untuk dapat melakukan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Elanda, Y., Suharnanik, & Putri, R. Y. (2023). *Optimalisasi Peran Kader PKK Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Dan Pencegahan Kekerasan*



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas
2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

- Dalam Rumah Tangga di Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Kabupaten Gresik. 2(1).*
- Haryana, D., Djaja, M., & Maznah, N. (2017). Seri Pendidikan Orang Tua : Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 40.
- Jannah, D., Erinaldi, Rahmadani, A., & Yusmaini, E. (2024). Peran PKK Kelurahan Rimba Sekampung Dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan Seksual dan Perundungan. *Jurnal PESAT Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Jovani, A. (2016). Belajar Dari Desa: Pkk Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan. *Aristo*, 4(1), 146. <https://doi.org/10.24269/aristo.iv/1.2016.10>
- Neherta, M. (2017). Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas*, 1(1), 1–63.
- Pane, N. (Ed.). (2015). *Mohammad Hatta, Politik, Kebangsaan dan Ekonomi (1926-1977)*. Kompas.
- Pitriyanti, P. (2016). *Transformasi Digital Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*. 1–32.
- Rantung, J. F., Mandey, J., & Londa, V. Y. (2014). Peranan PKK dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(5), 1–11.
- Wijayanto, R., Dewi, S. A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 365–374.